

PENGUATAN PRAKSIS BIMBINGAN KONSELING DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Esty Rokhyani
Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
Email: esty.rokh@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji tentang kesiapan guru BK dalam menghadapi tantangan merdeka belajar dan strategi bimbingan konseling yang relevan dengan kurikulum merdeka belajar sebagai penguatan praxis dalam implementasi kebijakan merdeka belajar. Desain penelitian ini adalah *Literature Review* dengan metode perpustakaan. Hasil kajian menjelaskan bahwa 1) kesiapan guru BK dalam memberikan layanan BK bagi peserta didik dibutuhkan dalam bentuk pemahaman dan kompetensi, pengalaman dan akses dalam memberikan praxis BK yang tepat; 2) Strategi bimbingan konseling yang relevan dengan kurikulum merdeka belajar antara lain strategi layanan BK dalam Asesmen Kompetensi Minimum, strategi penguatan pendidikan karakter, strategi Penyusunan RPL BK Satu Lembar Halaman dan strategi peningkatan kompetensi *Information Computer dan Technology*.

Kata kunci: *Bimbingan dan konseling, kebijakan merdeka belajar*

ABSTRACT

This paper aims to examine the readiness of BK teachers in facing the challenges of independent learning and counseling guidance strategies that are relevant to the independent learning curriculum as a strengthening of praxis in the implementation of independent learning policies. The design research was Literature Review with library method. The results explained that 1) the readiness of BK teachers in providing BK services for students is needed in the form of understanding and competence, experience and access in providing appropriate BK praxis; 2) Counseling guidance strategies relevant to the independent learning curriculum include BK service strategies in Minimum Competency Assessment, character education strengthening strategies, One Page BK RPL preparation strategies and Information Computer and Technology competency improvement strategies.

Keywords: *Guidance and counseling, independent learning policy*

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar digagas Menteri Pendidikan diharapkan menjadi solusi atas berbagai masalah yang terjadi, terutama hal penetapan orientasi tujuan pendidikan. Kebijakan tentang merdeka belajar muncul di era revolusi *industry 4.0* dan *society 5.0* saat ini. Era revolusi *industry 4.0* dan *society 5.0* yang memiliki tantangan sekaligus peluang bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia. Pada konteks era revolusi *industry 4.0*, syarat utama untuk maju dan berkembang sebuah lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi dan berkolaborasi. Inovasi dan kolaborasi diperlukan dalam era revolusi *industry 4.0* dan *society 5.0*, jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi maka kemungkinan akan tertinggal.

Sebaliknya, sebuah lembaga pendidikan akan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa dalam kebijakna pendidikan yaitu membelajarkan manusia yang merdeka. Artinya, lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Risdianto (2019) menjelaskan bahwa sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik untuk dapat memiliki kemampuan berfikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif, ketrampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, keterampilan mencari, keterampilan mengelola, keterampilan menyampaikan informasi serta keterampilan menggunakan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan zaman.

Merdeka belajar artinya kebebasan belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sebebaskan mungkin untuk belajar dengan tenang, santai, dan bahagia tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami mereka, tanpa memaksa peserta didik untuk belajar atau menguasai suatu bidang ilmu di luar hobi dan kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki portfolio yang sesuai dengan *passion* (Abidah, 2020:41). Hal ini bukan berarti peserta didik menindaklanjuti ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dseenaknya. Merdeka Belajar ini justru mengharuskan peserta didik untuk dapat berpikir kritis tentang masa depan yang dapat diraihny jika mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Apabila rangkaian tersebut dapat terlaksana, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pendidik akan tercapai secara maksimal. Adanya bekal kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari dan dimiliki, peserta didik diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang (Barnadib, 2002:58-59).

Konsep merdeka belajar sama dengan pendidikan *humanistic* yang menekankan pada kebebasan, pilihan, kepekaan dan tanggung jawab peserta didik. Pendidikan *humanistic* menerapkan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian peserta didik, dan berfokus pada potensinya untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka miliki. Bahkan menurut para ahli pendidikan, dalam penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya peserta didik berpikir yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain akan tetapi biasakan peserta didik mencari sendiri segala pengetahuannya dengan menggunakan pikiran sendiri. Hal itu karena seorang peserta didik pada dasarnya mampu berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan melalui dirinya (Hendri, 2020:27). Perubahan perilaku dalam belajar ini menurut Ki Hajar Dewantara melalui proses penalaran, penghayatan dan pengamalan. Bahasa lain

konsep belajar Ki Hajar Dewantara ini adalah cipta, rasa dan karya sebagai “konsep trisakti jiwa”. Artinya, belajar di dunia pendidikan bukan hanya sekedar alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tetapi juga harus adanya transformasi nilai (*transformation of value*). Dalam rentang sejarah pendidikan di Indonesia pernah mengenal sistem “among” Ki Hajar Dewantara, yakni sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang dapat mengatur dirinya sendiri, manusia yang berdiri sendiri dalam merasa, berpikir, dan bertindak, manusia yang berkepribadian dan berkarakter (Sambo, 2013). Konteks sama dengan Howard Gardner (2007) dalam “*Multiple Intelligences*” menyebutkan bahwa perubahan tingkah laku dalam belajar harus mewujudkan dalam bentuk kapabilitas, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Secara metodis filosofis, perubahan ini menjadi transformasi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan pokoknya adalah mengubah Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen Kompetensi Minimum yang dilakukan bukan berbasis penguasaan konten sebagaimana Ujian Nasional, melainkan menguji kemampuan bernalar tentang teks (literasi) dan angka (numerasi). Waktu pelaksanaan kurikulum merdeka belajar berbeda, yaitu tidak lagi di akhir jenjang melainkan dilakukan di tengah jenjang sekolah (Tohir, 2019). Ujian Nasional, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter muncul sebagai jalan tengah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih komprehensif, yaitu dengan tidak menjadikan ujian sebagai standarisasi penilaian apalagi penentu kelulusan, dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya yang selama ini diabaikan, yaitu karakter. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter atau yang biasa disingkat AKM dan SK ini, dirancang sebagai pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Asesmen kompetensi diarahkan agar mampu memberi dorongan yang lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan sekedar hapalan. Hal tersebut juga ditunjang dari waktu pelaksanaannya di tengah jenjang, tidak lagi di akhir jenjang, sehingga memberikan waktu kepada guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar para peserta didiknya. Sedangkan survei karakter ditujukan untuk mengukur aspek yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, seperti karakter peserta didik dan iklim di sekolah yang meliputi kebinekaan, perilaku *bullying*, dan kualitas pembelajaran. (Tohir, 2019).

Beberapa keputusan penting yang akhirnya bersinggungan dengan peran guru BK di antaranya adalah kegiatan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK) sebagai ganti dari dihapuskannya kebijakan ujian nasional (UN), yang kedua adalah dihapuskannya Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang ketiga adalah Penyederhanaan RPP/

RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan) menjadi hanya 1 lembar, serta kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi. Peran guru BK dalam mendukung kesuksesan penerapan program merdeka belajar. Perumusan peran ini sangat penting dalam upaya meningkatkan eksistensi guru BK dan penghargaan dari pihak lain, selain itu perumusan peran ini akan memberi dampak yang konstruktif bagi peningkatan kinerja guru BK. Dari perspektif ini berarti kemampuan konselor untuk mengatur perannya sejalan dengan kebijakan merdeka belajar menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan mengatur diri dalam konteks menjalankan tugas profesi sangat diperlukan.

Merdeka Belajar bila dikaitkan dengan guru BK adalah adanya kebebasan dalam berinovasi dan berkreasi dalam memilih berbagai macam strategi pemberian layanan untuk membantu mengatasi segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik/konseli dengan menggunakan berbagai macam pendekatan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Konsep “Merdeka Belajar” bagi peserta didik/konseli dalam kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling baik bimbingan pribadi atau konseling individual semua keputusan dikembalikan pada diri peserta didik/konseli sendiri. Peserta didik mulai dari memilih berbagai alternatif, menentukan pilihan alternatif sampai menyusun rencana dari pilihan alternatif yang diambil yang sesuai dengan konsep yang ada pada diri peserta didik/konseli. Kebijakan “Merdeka Belajar” bagi guru BK dapat diimplementasikan bersifat menyenangkan guna memecahkan permasalahan peserta didik/konseli secara diskusi memunculkan ide-ide dari peserta didik dan dapat fokus pada penyelesaian tugas dan alternatif jalan keluar dari permasalahan diri peserta didik/konseli itu sendiri.

Guru bimbingan dan konseling merupakan pendidik yang tugasnya membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah dan lingkungan eksternal sekolah. Guru BK ataupun konselor bertanggung jawab untuk membantu peserta didik menyadari kemampuan yang ada dalam dirinya dan menemukan alasan masalah yang mencegah terjadinya masalah dalam dirinya dan bisa memenuhi harapan yang diinginkan oleh peserta didik ataupun klient. Oleh karena itu, guru BK lebih mengembangkan metode dalam praksis BK untuk menghadapi tantangan dalam merdeka belajar.

Tujuan penulisan ini antara lain mengkaji tentang kesiapan guru BK dalam menghadapi tantangan merdeka belajar dan strategi bimbingan konseling yang relevan dengan kurikulum merdeka belajar sebagai penguatan praksis dalam implemmentasi kebijakan merdeka belajar.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka *Literatures review* adalah uraian tentang teoris, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. *Literature review* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet) tentang topik yang dibahas. *Literature review* yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan *literature review*. Metode perpustakaan yang terlibat adalah perpustakaan dengan sistem terbuka, dimana peminjam dapat secara langsung mencari dan memilih buku atau sumber yang mereka butuhkan untuk masuk ke perpustakaan (Harahap, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Guru BK dalam Menghadapi Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar merupakan transformasi pendidikan yang ditetapkan pada saat pandemi wabah Covid-19 menyebar di bulan Maret 2020. Langkah yang diambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar peserta didik mendapatkan hak dan kewajiban dengan kondisi pandemi Covid-19. Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar banyak menghadapi kendala dan tantangan terutama dalam kesiapan guru dalam mensukseskan kebijakan merdeka belajar.

Ada urgensi lain yang harus lebih diprioritaskan dalam pelaksanaan merdeka belajar yakni peserta didik harus memperoleh layanan pembelajaran dan bimbingan. Hal ini tidak lain dikarenakan stimulasi tubuh kembang peserta didik tetap di perlukan secara spesifik, dengan memperhatikan dinamika psikologis dalam menerapkan kebijakan merdeka belajar. Oleh karena itu, kendala yang berkaitan dengan penerapan kebijakan merdeka belajar maka dibutuhkan kesiapan guru dalam melakukan pembelajaran termasuk kesiapan guru BK yang berperan penting dalam upaya melayani peserta didik. Guru BK perlu segera menyikapi dan berperan dalam mensukseskan implementasi program tersebut. Upaya menyikapi untuk dilakukan agar ekspektasi kinerja guru BK semakin baik. Oleh karena itu, guru BK perlu memahami lebih detail dan mendalam berbagai landasan peraturan, hakekat merdeka belajar serta petunjuk pelaksanaan program merdeka belajar dan mampu melakukan praksis sistem BK yang tepat dilakukan pada program merdeka belajar.

Paradigma yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan merdeka belajar belum sepenuhnya dapat terlaksana akibat berbagai problematika. Kesiapan sumber daya manusia dan perangkat fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi kebijakan merdeka belajar termasuk guru BK (Nanda *et al.*, 2020). Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pemberian layanan pada era covid-19 dan dalam kurikulum merdeka Belajar merupakan sebuah tantangan Kondisi ini memaksa guru atau sekolah harus mencari solusi agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tetap optimal.

Kesiapan guru BK sekolah sebagai agen perubahan, sebagai agen pencegahan, sebagai pengembang karir, sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai koordinator, sebagai asesor dibutuhkan dalam mensukseskan implementasi program merdeka belajar. Peran dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam mensukseskan kegiatan dalam program merdeka belajar.. Guru BK memiliki peran berbeda dengan guru mata pelajaran lain. Guru BK tidak memberikan materi-materi ataupun tugas-tugas terkait kemampuan akademik tetapi secara khusus menyajikan layanan dalam pembelajaran daring melalui format yang bermakna bagi siswa. Layanan BK yang bermakna tidak terfokus pada capaian akademik atau kognitif, tetapi membantu siswa untuk mencapai capaian akademik dengan optimal, mengatasi hambatan belajar, pengembangan karakter baik dirumah dan bagaimana membantu siswa dalam pengembangan “*life skill*” atau keterampilan hidup sehari-hari.

Guru BK dalam kaitannya dengan merdeka belajar harus memiliki kesiapan seorang guru harus komprehensif dan integral sesuai dengan kompetensi guru BK. Guru BK harus memiliki aspek pribadi, sosial, belajar dan karir sebagaimana bidang layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling.. Kondisi yang bervariasi memberikan paradigma baru bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di era merdeka belajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menyiapkan masyarakat 5.0 dan generasi emas 2045, peserta didik perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk upaya pembentukan mental dan kecakapan intelegensinya (Elihami, 2019) sebagai bekal di era merdeka belajar. Hal tersebut dikarenakan pada era merdeka belajar pesera didik dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara fisik dan psikis untuk mendapatkan nilai-nilai edukasi yang dapat mengembangkan potensi.

Wickwire (2002) menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru BK dalam menyiapkan bimbingan konseling pada masa penerapan merdeka belajar. Pertama, *Expansion of Electronics*, pelayanan bimbingan dan konseling didukung dengan bantuan elektronika sebagai media seperti komputer dan internet, telepon dan televisi yang berlangsung di rumah, di masyarakat, dan di tempat kerja; Kedua, *Growth of Distance Learning*, belajar tidak dibatasi oleh waktu dan tempat seperti belajar berbasis Web (*Web-based learning*), pelatihan berbasis Web (*Web-based training*), penggunaan IT dalam proses belajar untuk meningkatkan

profesionalitas; Ketiga, *Emphasis on Competencies and Skills*, penekanan pada kompetensi dan keterampilan guru BK dalam melakukan unjuk kerja, berdasarkan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; Keempat, *Standards-based Education*, penyandang profesi bimbingan dan konseling (guru BK) harus lulusan lembaga pendidikan yang memenuhi standard dari organisasi profesi; dan Kelima, *Inculcation of Lifelong Learning*, belajar sepanjang hayat yang harus dilakukan oleh penyandang profesi bimbingan dan konseling.

Guru BK harus berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling, yang menguasai beberapa aspek yaitu: (1) Kepemimpinan yang ditunjukkan memiliki perilaku keaslian, visibel, berbudaya, dan pelayanan yang berkualitas; (2) Sistem yang mencakup; program, layanan, materi, struktur proses, sikap bijak, teknik, dan kemampuan melakukan; (3) Domain yang mencakup; afektif, kognitif, akademik- pendidikan, karier, pribadi-sosial; (4) Memberikan bantuan yang mencakup; pencegahan, pengembangan, perbaikan, dan intervensi krisis; (5) pelayanan yang bersifat pencerahan, mencakup; asesmen, diagnostik, perencanaan dan persiapan, implementasi-monitoring, dan evaluasi-pendauran ulang (siklus); dan (6) Evaluasi yang mencakup; formatif, sumatif, tindakan, belajar, tingkah laku, hasil, dan tujuan akhir.

Saat ini kebijakan merdeka belajar sudah berjalan. Tetapi dalam prakteknya di lapangan masih banyak kendala dan kurangnya kesiapan guru BK dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Hal itu karena Merdeka Belajar menjadi suatu kebijakan yang dianggap transformatif di dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru sehingga guru BK masih yang belum memiliki kesiapan antara lain:

1. Pengalaman dengan merdeka belajar

Pengalaman personal para guru BK terkait merdeka belajar masih minim. Alasan guru BK belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan.

2. Akses yang Dimiliki dalam Pembelajaran

Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru BK dalam pelaksanaan merdeka belajar. Dalam wacana pelaksanaan merdeka belajar yang disampaikan Mendikbud, ada enam model pembelajaran yang dapat diterapkan. Salah satu model belajar yang dapat dilakukan ialah daring. Kelancaran pelaksanaan belajar secara daring ditentukan dari akses digital dan internet yang dimiliki guru dan siswa. Sekolah-sekolah masih banyak yang belum memiliki

fasilitas memadai atau guru dan siswa yang aksesnya terbatas mengalami kesulitan. Perbedaan fasilitas, sarana prasarana dan kemudahan akses teknologi menjadi kendala yang terkadang dihadapi guru.

3. Manajemen Waktu

Upaya transformasi proses pembelajaran, guru BK mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Guru BK bergerak dan menemukan cara kreatif inovatif dalam pembelajaran. Guru BK mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang lain yang sekiranya dihadapi.

4. Kompetensi (*Skill*) yang belum memadai

Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru BK. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Ms. Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lainnya. Sedangkan pelaksanaan merdeka belajar, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong siswa. Kompetensi yang masih minim ini juga menjadi kendala guru dapat menjalankan merdeka belajar dengan cepat. Alasan adanya perubahan selalu diiringi dengan berbagai permasalahan. Sistem pendidikan yang dianggap sudah perlu diperbaiki karena hasil evaluasi yang dilakukan selama ini.

Guru BK menjadi dinamisor atau penggerak sebagai ujung tombak demi perubahan dan kemajuan merdeka mengajar dan belajar di era industri 4.0 di mana teknologi dan informasi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, guru BK harus mampu dan siap melaksanakan kebijakan merdeka belajar dengan berbagai kompetensi yang digunakan dalam memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik nantinya.

Strategi Bimbingan Konseling yang Relevan dengan Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia suasana yang *happy*, bahagia bagi peserta didik maupun para guru. Layanan bimbingan dan konseling dikaitkan dengan konsep merdeka belajar bagi peserta saat ini meliputi kegiatan layanan bimbingan dan konseling, baik bimbingan pribadi atau konseling pribadi pengambilan keputusan dikembalikan kepada

peserta didik dalam memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya. Berkaitan dengan guru BK, maka merdeka belajar dapat dikatakan bahwa dalam pemberian layanan, guru BK diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam memilih berbagai macam strategi layanan untuk membantu mengatasi permasalahan peserta didik dengan menggunakan berbagai macam pendekatan yang disesuaikan dengan perkembangan era teknologi dan informasi.

Guru BK dapat memberikan pendampingan dan memotivasi siswa adalah melalui konseling di media sosial. Tindakan konseling yang seharusnya dilaksanakan secara *face to face* dapat diganti melalui media sosial seperti *zoom* ataupun *whatsapp* tanpa mengurangi esensi penting dari layanan konseling yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan salah satu kode etik yang wajib dipegang guru BK dalam memberikan layanan konseling.

Guru BK dalam melaksanakan tugas senantiasa menjunjung tinggi kompetensi berharkat dan bermartabat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Guru BK, adapun kompetensi Guru BK yang dimaksud meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) memahami teori dan teknik berbasis perkembangan dan eviden, (3) memberikan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, (4) melaksanakan asesmen perkembangan konseli dengan pengukuran psikologis dan non psikologis, (5) memahami perkembangan konseli yang masalahat, bermartabat, kreatif, dan inovatif, (6) melakukan supervisi dan akuntabilitas berbasis perkembangan, dan (7) siaga dalam pengembangan diri baik melalui jalur pendidikan formal maupun terlibat langsung dalam kegiatan ilmiah.

1. Strategi layanan BK dalam Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen Kompetensi Minimum yaitu Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kedua kegiatan ini sebenarnya juga masuk dalam lingkup bimbingan dan konseling dengan menggunakan asesmen tes. Asesmen merupakan penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli. Pemahaman diri siswa/konseli harus didasarkan pada adanya keterangan tentang diri yang akurat dan sah. Data diri yang tidak akurat bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. Data yang demikian hendaknya juga dibarengi dengan pengamatan terhadap siswa/konseli. Untuk itu diperlukan instrumen asesmen baik dalam bentuk tes maupun non tes. Guru BK biasanya menggunakan teknik tes yang merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Hasil tes yang lazim digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling antara lain tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes kreativitas, tes sikap dan tes prestasi belajar. Asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu (waktu dilakukan asesmen)

baik potensi-potensinya maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga dapat melakukan layanan/intervensi secara tepat.

2. Strategi Penguatan Pendidikan Karakter

Survei karakter yaitu penguatan pendidikan karakter yang merupakan bagian dari ranah tugas guru BK di sekolah, terutama dalam aspek emosional, sosial, dan moral. Penguatan pendidikan karakter dapat diimplementasikan dalam bentuk layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok atau layanan konseling kelompok dengan penyampaian yang dirasa sangat menyenangkan bagi anak. Guru BK juga menggunakan teknis non tes yang merupakan teknik untuk Teknis non tes yang sering digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling antara lain : observasi, wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi. Instrumen pengumpul data yang sering digunakan untuk mengenali masalah serta kebutuhan layanan BK antara lain : Daftar Cek Masalah (DCM), Alat Ungkap Masalah (AUM), Inventori Tugas Perkembangan (ITP).

3. Strategi Penyusunan RPL BK Satu Lembar Halaman

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (baca RPL) dapat meringankan tugas guru dalam hal administrasi termasuk guru BK juga dimudahkan, karena tidak sedikit Guru BK yang ditugasi oleh sekolah di luar tugas sebagai guru BK. Jika dikaitkan dengan Bimbingan dan Konseling (BK) bentuk RPL BK yang dibuat guru BK tidak dikhususkan harus sama seperti RPP yang dibuat oleh guru Mapel. Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah juga tidak dicantumkan bagaimana bentuk RPL BK. Guru BK memakai bentuk RPL BK yang ada di dalamnya karena itu hanya alternatif contoh selanjutnya guru BK diminta untuk berkreasi dan berinovasi sendiri termasuk RPL BK yang hanya satu lembar.

4. Strategi Peningkatan Kompetensi *Information Computer dan Technology*

Guru BK harus paham teknologi dan mengembangkan keterampilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi diejawantahkan dalam program bimbingan dan konseling, yakni: asesmen perkembangan konseli berbasis *online*, *cybercounseling*, *teleconference*, pengembangan media bimbingan dan konseling berbasis *online*, dan menjalin kerjasama antar Guru BK dalam komunitas profesional bimbingan dan konseling melalui *group WhatsApp*, *group facebook*, dan *group tweeter*. Kebutuhan peserta didik bukan hanya layanan konseling klasik/konvensional melainkan konseling dilakukan tidak bertatap muka secara langsung. Keakraban para peserta didik dengan media sosial, seperti

facebook, twitter, instagram, blog, e-mail, skype, whatsApp, dan bistri videocall dapat menjadi sarana penting untuk dimaksimalkan, sehingga tidak disalahgunakan oleh para peserta didik. Media berbasis *website* menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk peserta didik. Para peserta didik tidak asing dengan media internet. Media internet untuk berkomunikasi, mencari sumber belajar, bermain, menonton video, youtube, mendengarkan musik, bisnis, dan lain-lain. Media tersebut mudah digunakan, memiliki asas kerahasiaan, praktis, dan dapat diakses dari mana saja. Bahkan media tersebut dapat diaplikasikan dalam layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu *counseling online—cybercounseling* menjadi pilihan bagi para peserta didik untuk mengonsultasikan problem. Adanya terobosan baru untuk mengembangkan konseling *online* sangat diperlukan agar peserta didik dapat memanfaatkan layanan konseling yang diberikan oleh Guru BK tanpa harus bertemu secara *face to face* melainkan dilakukan melalui jarak jauh (*distance/remote counseling*). Model layanan konseling *online/cybercounseling* dibutuhkan oleh para Guru BK dimana peserta didik tidak terikat oleh jarak dan waktu ketika berkonsultasi dengan Guru BK, dapat dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak mengganggu jam belajar peserta didik di sekolah. Konseling *online* berbasis *website* terbaru hasil pengembangan adalah *bistri videocall* (Hidayah, 2015).

Implementasi kebijakan merdeka belajar perlu mengaplikasikan kebijakan tersebut ke dalam strategi dan model-model pendekatan dalam memberikan pembelajaran bagi peserta didik. Guru BK yang berkualifikasi dalam memberikan pemahaman teori dan praktik bimbingan dan konseling dituntut dapat menyesuaikan kurikulum materi dengan kondisi kurikulum merdeka belajar dalam mewujudkan proses pembelajaran menyenangkan sebagai salah satu karakteristik era merdeka belajar.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merdeka belajar telah berkontribusi memberikan perubahan untuk menyesuaikan program kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai dengan 1) kesiapan guru BK dalam memberikan layanan BK bagi peserta didik dibutuhkan dalam bentuk pemahaman dan kompetensi, pengalaman dan akses dalam memberikan praksis BK yang tepat; 2) Strategi bimbingan konseling yang relevan dengan kurikulum merdeka belajar antara lain strategi layanan BK dalam Asesmen Kompetensi Minimum, strategi penguatan pendidikan karakter, strategi Penyusunan RPL BK Satu Lembar Halaman dan strategi peningkatan kompetensi

Information Computer dan Technology. Dukungan sumber daya manusia dan perangkat fasilitas pendukung menguatkan praksis BK dalam mensukseskan kebijakan merdeka belajar dapat memenuhi tantangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman F, Imas K. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Cirebon. Universitas Islam Balitar Kediri Vol.12 No. 2.
- Barnadib, I. (2002). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta Adicita Karya Nusa.
- Baroroh I. (2020). Mengoptimalkan Proses Pembelajaran Dengan Media Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sipatokong BPSDM Sulawesi Selatan*. Wonogiri. SMKN 1 Wonogiri Vol.1 No.3 (diakses pada 29 Oktober 2020).
- Bungin Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta.
- Djamarah, S. B. (2013). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elia F and Jihan Fa. (2020). Layanan Bimbingan dan Konseling Ditengah Pandemi Covid- 19. Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan onseling. Surabaya. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Gadner, Howard. (2007). *Multiple Intelligences*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Iqbal, Faza A. (2020). Asesemen Alternatif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Penyebaran CoronaVirus Disease (Covid-19) Di Indonesia. *Jurnal Pedagogik*. Jogjakarta. UIN Sunan Kalijaga Vol.07 No.01
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik>
- Mochamad Nursalim. (2020). Peluang dan Tantangan Profesi Bimbingan dan Konseling di Era Revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling*. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya
- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanda, AK. (2020). Profesionalitas Konselor Selama Pandemi Covid-19. Prosiding Bimbingan dan Konseling. Malang. Universitas Negeri Malang.
- Rahma, Wn., Eva Kw, and Citra, Iu. (2020). Inovasi Pelayanan Konseling dalam Kerangka Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*. Malang. Universitas Negeri Malang.
- Ratnasari, R., Neviyarni, N., dan Firman, F. (2021). Peran Guru BK (Bimbingan dan Konseling) dalam Mensukseskan Program Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4051–4056. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1504>

- Risdianto, Eko. (2019). *Kepemimpinan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*. This Publication: <https://www.researchgate.net/publication/332423142>.
- Risdianto, Eko. (2019). *Kepemimpinan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*. This Publication at:<https://www.researchgate.net/publication/332423142>
- Safrianus HD. (2010). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Samho, Bartolomeus. (2013). *Emong, Among, Pamong: Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Kanisius.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 36962/MPK.A.HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Abidah, Azmil, et al. The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar”. *Studies in Philosophy of Science and Education*, vol. 1, no. 1, 1 Apr. 2020, pp. 38-49, DOI:10.46627/sipose.v1i1.9.
- Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020), *Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Tohir, M. (2019). *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. Jakarta: Arilangga.
- Wickwire, P., N. (2002). Current Trends and Their Implications for Futures in the Caounseling Profession. Dalam Johnson, C., D., and Johnson, S., K. (Ed.), *Building Stronger School Counseling Programs: Bringing Futuristic Approaches into the Present* (hlm. 3-15). Greensboro: CAPS Publications.